

# Prospek Hubungan RI dan Australia Tahun 2006

Wardinarsih Soerjohardjo

## PENGANTAR

*Sebagai orang Indonesia yang mempelajari sejarah masyarakat dan kebudayaan Australia, saya melihat adanya beberapa perbedaan sekaligus keselarasan antara sejarah masyarakat dan sikap budaya bangsa kita, Indonesia, dengan sejarah masyarakat dan kebudayaan tetangga dekat kita, Australia. Artikel ini diawali dengan tinjauan singkat sejarah dan budaya kedua masyarakat, dilanjutkan dengan analisis hubungan RI - Australia dalam kurun waktu 1945 - 2005, dan diakhiri dengan penutup, yang menganalisis prospek hubungan RI - Australia tahun 2006.*

## INDONESIA DAN AUSTRALIA: TINJAUAN SEJARAH DAN BUDAYA

### INDONESIA

Setelah mengalami perjuangan kemerdekaan yang sangat keras dan panjang sebagai akibat dari penjajahan oleh Belanda, kemudian disusul dengan penjajahan oleh Jepang, akhirnya kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada

tanggal 18 Agustus 1945 Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disahkan, dan penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia (RI) berbentuk Negara Kesatuan RI (NKRI) dimulai, dengan pembentukan beberapa propinsi di bawah NKRI. Namun demikian, Belanda belum bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga pecah-

lah Perang Kemerdekaan antara geril-yawan Indonesia melawan pihak Belanda, yang kemudian berakhir dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949 atas seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali Irian Barat (hasil perundingan RI-Belanda: Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda). Atas desakan pihak Belanda, sejak bulan Desember 1949, bentuk pemerintahan RI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terpecah belah dalam beberapa Negara Bagian. Usia RIS tidaklah lama, karena di dalam sanubari para tokoh pejuang kemerdekaan, semangat persatuan Indonesia telah terpatri kuat jauh sebelum Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu sejak *Sumpah Pemuda* dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh berbagai organisasi pemuda yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, yang isinya:

*KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONE-SIA, MENGAKU BERTUMPAH DA-LAH YANG SATU, TANAH AIR IN-DONESIA*  
*KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONE-SIA MENGAKU BERBANGSA SATU, BANGSA INDONESIA*

*KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONE-SIA MENJUNJUNG TINGGI BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONE-SIA*

Dengan semangat persatuan tersebut di atas, sebagian besar tokoh pejuang kemerdekaan dari berbagai wilayah di Indonesia, mengadakan serangkaian pertemuan yang menghasilkan pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbentuk Republik pada 17 Agustus 1950, dengan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang mengumandangkan diberlakukannya kembali UUD 1945 di Indonesia. Hal ini dikarenakan gagalnya Konstituante membentuk Undang-Undang Dasar. Sementara itu penerapan Demokrasi Parlementer berdasarkan UUDS 1950, dimana para menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen, kurang sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga kabinet RI menjadi terlalu rentan dan mudah jatuh. Dalam kurun waktu 1950-1959, usia rata-rata berbagai kabinet hanya sekitar tujuh bulan, yang berakibat pada terhambatnya rencana pembangunan. Kondisi ini memburuk dengan terjadinya berbagai per-

golakan di daerah, yang pada tingkat tertentu diwarnai oleh campur tangan asing. Akibatnya, kestabilan politik dan keamanan pada masa itu sulit tercapai. Namun demikian, perjuangan merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda berhasil dicapai dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI pada tahun 1963. Setahun kemudian terjadi konflik RI - Malaya yang dikenal dengan *Ganyang Malaysia* oleh Indonesia yang menentang pembentukan Negara Federasi Malaysia, yang dianggap sebagai "boneka" Inggris. Dalam situasi Perang Dingin, pihak Barat menganggap politik Indonesia telah cenderung bergeser "ke kiri", yang tampak dalam pembentukan "Poros Jakarta - Peking". Kemelut konflik RI - Malaysia ini disusul dengan tragedi nasional *Pemberontakan Gerakan 30 September PKI* pada tahun 1965. Tragedi nasional ini mengakibatkan terjadinya pergantian pimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto dan dimulailah suatu Pemerintahan Orde Baru, yang menekankan pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen<sup>1</sup>.

Pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto yang berjalan selama 32 tahun kemudian tergoyahkan dengan terjadinya krisis multi-dimensi, yang mengakibatkan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk Pemerintahan RI pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak itu dimulailah era reformasi, yang menekankan transparansi dalam berbagai bidang, dengan semboyan populer "Hapuskan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)". Era reformasi ini ditandai dengan sikap yang cenderung lebih terbuka dalam diskusi *poleksosbudhankam* (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan), baik melalui media cetak maupun media elektronik disertai berbagai upaya penegakan hukum. Gerakan reformasi yang dipimpin oleh beberapa tokoh nasional dari berbagai aliran politik, berhasil membawa kehidupan politik, sosial, dan budaya di Indonesia, ke dalam suasana yang lebih demokratis. Hal ini jelas tampak di dalam amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1999-2002, diantaranya menyangkut beberapa pasal yang mengatur Bentuk dan Kedaulatan; Majelis Permusyawaratan Rakyat; kekuasaan Pemerintahan Negara; Pemerintahan Daerah; dan, Pemilihan

<sup>1</sup> Pembahasan tentang Sejarah Indonesia dapat dilihat dalam Sartono Kartodirdjo, Marwat Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto (Editor), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V dan VI, Depdikbud, 1976.

Umum.<sup>2</sup> Sesuai dengan amandemen UUD 1945 tersebut, pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum yang lalu, dapat diadakan secara langsung dalam suasana demokratis dan damai. Kini Pemerintah RI mulai menerapkan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang keseimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Dalam berbagai gejolak perjalanan sejarah Indonesia, ada suatu hal yang tak tergoyahkan, yaitu Pancasila, yang merupakan ideologi negara, filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta terbukti sangat ideal dan memiliki nilai strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, terdiri dari 5 (lima) butir nilai, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia). Selaras dengan hal tersebut, suatu tipe demokrasi telah berkembang di Indonesia, yaitu *Demokrasi Pancasila*,

yang lebih menekankan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## AUSTRALIA

Berbeda dengan Indonesia, Australia yang berpenduduk asli Aborijin, pada tahun 1788, telah dijadikan koloni untuk pembuangan *convicts* (para narapidana) dari Kerajaan Inggris, dan lambat laun mengalami peningkatan jumlah *free settlers* (pemukim bebas – bukan narapidana) khususnya pada masa penemuan emas tahun 1850an. Gerakan kuat menentang *transportation* (pengiriman narapidana dari Inggris ke Australia) dari kelompok liberal-humanis akhirnya berhasil menghentikan *transportation* pada tahun 1850 untuk koloni New South Wales dan 1870 untuk koloni Australia Barat.<sup>3</sup> Menurut kelompok liberal-humanis, suatu masyarakat yang sebagian besar penduduknya terdiri dari narapidana hanya akan mengarah pada terciptanya a *broken society*. Sejarah Australia mencatat bahwa peningkatan produksi gandum dan wol pada tahun 1830an, disusul dengan penemuan berbagai ladang emas pada tahun 1850an dan penemu-

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Lengkap, Jakarta, Penerbit Poliyama Widya-pustaka (tanpa tahun terbit).

<sup>3</sup> J.B. Hirst, *Convict Society and its enemies*, Sydney, George Allen & Unwin, 1987 (Cetakan Keempat), hal. 163-164.

an tambang batubara pada tahun 1870-an, telah mengantar Australia ke tingkat kemakmuran ekonomi, sehingga negara tersebut dijuluki *the lucky country*. Penemuan batubara telah memicu pembangunan jaringan kereta api, sehingga seluruh Australia berhasil disatukan oleh jaringan kereta api pada tahun 1870. Akibatnya komunikasi antar penduduk kulit putih menjadi lancar, yang kemudian menciptakan rasa persatuan dan nasionalisme bangsa Australia, khususnya di kalangan masyarakat putih. Kemakmuran ekonomi di berbagai koloni Australia kemudian disusul dengan tuntutan untuk mendapatkan hak-hak politik yang lebih luas. Maka secara bertahap koloni-koloni di Australia memperoleh status *Self-Government* (Pemerintahan sendiri. Pada tahun 1856 misalnya, Kerajaan Inggris menganugerahkan status *Self-Government* kepada koloni Victoria, kemudian menyusul berbagai koloni lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1901 Pemerintahan Persemakmuran Australia (*Australian Commonwealth Government*) yang berbentuk federasi didirikan, dan status koloni di Australia berubah menjadi *State* (Negara Bagian). Selanjutnya, sejarah mencatat keterlibatan Australia dalam dua Perang Dunia, disusul dengan semakin meningkatnya peran Australia dalam kancah

percaturan politik internasional. Australia telah mendukung kebijakan Amerika Serikat terhadap Vietnam dan terlibat dalam Perang Vietnam tahun 1970an. Australia juga berperan dalam penyelesaian masalah Kamboja. Kebijakan politik luar negerinya yang mendukung Amerika Serikat dalam Perang Teluk Pertama dan kini Perang Teluk Kedua, menimbulkan permasalahan domestik dan internasional yang kompleks. Berdasarkan Pakta Pertahanan ANZUS (Australia, New Zealand dan United States), maka Australia cenderung akan selalu terlibat dalam berbagai perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat di dunia.

Masyarakat dan sikap budaya kedua bangsa pun berbeda. Indonesia yang merupakan negara kepulauan berpenduduk sekitar 200 juta jiwa, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama, mengarah pada *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda, namun tetap satu jua), sedangkan Australia, yang merupakan negara benua, dengan aneka rakan ras yang datang dari berbagai penjuru dunia, mempunyai penduduk berjumlah sekitar 20 juta jiwa, dan pada tahun 1970an mencanangkan masyarakatnya sebagai *a multi-cultural society*. Masyarakat Indonesia cenderung bersifat agamis, yang terlihat dari

pencatuman sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" di dalam Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus ideologi NKRI. Sedangkan masyarakat Australia cenderung bersikap individualis, liberal dan sekuler sebagai akibat pengaruh *free thinking movement* dari Inggris ke Australia pada awal tahun 1840an, yang berdampak pada penghapusan subsidi dari Pemerintah Kolonial Inggris di Australia kepada seluruh sekolah Kristen pada tahun 1870.<sup>4</sup> Sementara masyarakat Indonesia cenderung bersikap gotong royong dan kolektifis, sebagai warisan leluhur.

Sikap masyarakat Australia yang cenderung liberal tersebut telah berakar sejak pertengahan abad ke 19, yang tercermin dalam berbagai sumber primernya, seperti bahan-bahan pengabdian, surat kabar, majalah, *parliamentary papers*, manuskrip, dan berbagai karya sastra pada masa itu.<sup>5</sup> Surat kabar *The Sydney Atlas*, tanggal 22 Februari 1845 misalnya, memuat ungkapan John Punch yang memprotes

penguasa dan sekaligus mengecam keras penduduk Gundagai yang terlalu pasrah menghadapi banjir yang menggenang tanpa mampu menukar tanah yang telah dibelinya di tempat rendah dan menukarkannya ke tempat yang lebih tinggi. Punch secara gigih menghasut agar penduduk Gundagai bangkit untuk memperbaiki nasibnya, tanpa perlu memikirkan sembahyang dan petisi:

*Are you senseless, mad men of  
Gundagai*

*Have the floods which roar above  
your heartstones left their stagnant  
waters of your brain,*

*... You have bought, and you have  
paid for -*

*You have bargained, and have been  
deceived -*

*Up and be stirring, then Men of  
Gundagai !*

*Erect your brazen ensign !*

*Think no more of prayer and peti-  
tion!*

Di Australia, terdapat indikasi kuat bahwa struktur sosial yang berbeda tajam dilenturkan oleh tradisi egaliter<sup>6</sup> dan

<sup>4</sup> Wardiningsih Soerjohardjo, "Language Control in New South Wales 1788-1950", Ph.D Thesis, University of New South Wales, Sydney, Australia, 1994.

<sup>5</sup> Ibid., dan Wardiningsih Soerjohardjo, "Aspects of Life in Gundagai 1840-1860". MA Thesis, Australian National University, Canberra, Australia, 1987.

<sup>6</sup> Russel Ward, *The Australian Legend*, London,, Oxford University Press, 1958, hal. 83-84; dan John Hirst, "Egalitarianism" dalam *Australian Cultural History*, No. 5, 1986, hal. 21-31.

kecenderungan untuk memangkas jatuh *the tall poppies* (orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial jauh lebih tinggi dari pada kebanyakan orang pada umumnya). 'The Gundagai Bench Book of Magistrates' tahun 1858 misalnya, mengungkapkan bagaimana seorang opas pos dijatuhi hukuman kurungan 3 bulan di penjara kota Goulburn atau membayar denda sebesar 5 poundsterlings dan 2 shillings karena

menghina seorang polisi yang kebetulan lewat didepannya, dengan bertanya sinis kepada temannya: "*Is that Young, he is a monkey faced bugger!*"<sup>7</sup> Sikap cenderung agresif dan anti penguasa orang Australia juga dikemukakan oleh Craig McGregor, pengamat kebudayaan Australia.<sup>8</sup> Pada umumnya orang Australia memandang Pemerintahan Federal di Canberra sebagai a distant authority (penguasa yang jauh/berjarak).

## II HUBUNGAN RI – AUSTRALIA 1945 – 2005

Saya telah membahas beberapa kunci sikap dan nilai-nilai budaya dari perspektif Indonesia dan Australia. Beberapa perbedaan dalam sikap dan nilai-nilai budaya dari kedua masyarakat adalah sebuah kenyataan. Masyarakat Indonesia bersifat agamis, sementara aspek atheisme Australia merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Beberapa perbedaan lainnya mungkin masih dapat ditemukan. Bagi Indonesia, yang mengalami perjuangan panjang, gigih dan berdarah untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang, maka prioritas

utama diberikan pada kestabilan politik, kesatuan nasional dan integritas wilayah NKRI. Prioritas utama tersebut mengandung nilai strategis mengingat sangat tingginya jumlah penduduk Indonesia, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama dan kepercayaan yang saling berbeda dan menempati beragam pulau yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Sementara Australia, tidak memiliki rekaman sejarah perjuangan melawan penjajah asing untuk mencapai kemerdekaannya. Pendaratan Captain James Cook di Botany Bay, dekat Sydney, pada bulan

<sup>7</sup> Wardiningsih Soerjohardjo (1986), Op.Cit.

<sup>8</sup> Craig McGregor, Profile of Aus

April 1770, kemudian disusul dengan pengambil-alihan "daerah" tersebut di Possession Island untuk King George III dan menamakannya "New South Wales" (*mother colony of Australia*), tanpa perlawanan orang Aborijin, penduduk asli Australia.<sup>9</sup> Maka dimulailah sejarah peradaban Barat di Australia, yang kadangkala diselingi dengan riak-riak perjuangan panjang orang Aborijin melalui *Land Right Movement* untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Pemerintah Australia telah menerapkan berbagai kebijakan khusus menyangkut beberapa aspek kehidupan orang Aborijin.

Kenyataannya, tidak hanya perbedaan dalam latar belakang sejarah, masyarakat dan sikap budaya yang terdapat antara Indonesia dan Australia, tetapi terdapat pula indikasi adanya keselarasan antara keduanya. Prinsip *egalitarianism* (persamaan dalam hak, kedudukan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan) misalnya, selaras dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Di samping itu, kedua pemerintahan sama-sama mempunyai tekad untuk menggalang kerjasama

yang erat dan saling menguntungkan dalam berbagai bidang.

Sejarah mencatat bahwa kedua masyarakat telah membina hubungan sejak dahulu. Sejarawan Australia, Campbell Macknight misalnya, mencatat adanya hubungan antara pelaut-pencari teripang suku bangsa Bugis dengan masyarakat Aborijin di pantai utara benua Australia.<sup>10</sup> Selanjutnya, Rupert Lockwood dan Margaret George, mencatat peran Persatuan Buruh Pelabuhan Australia (*Australian Waterside Workers*) yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 24 September 1945, seluruh buruh pelabuhan di Australia memboikot dan menolak untuk memberikan pelayanan pada semua kapal Belanda yang akan berangkat menuju Indonesia.<sup>11</sup> Namun demikian, sejarah juga mencatat pasang surutnya hubungan kedua negara, terutama dikarenakan oleh perbedaan sistem nilai budaya dan politik dari kedua negara dan masyarakat.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno yang cenderung bergeser "kekiri" pada

<sup>9</sup> Manning Clark, *A Short History of Australia* (Hard Copy and Illustration Edition), The Macmillan Company of Australia Pty Ltd, 1981, hal. 14.

<sup>10</sup> C.C. Macknight, *The Voyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia*, Melbourne Universit Press, 1976.

<sup>11</sup> Rupert Lockwood, *Black Armada*, Sydney, Australia Book Society, 1975; dan Margaret George, *Australia and the Indonesian Revolution*, Melbourne University Press, 1980, hal. 95.

paruh kedua tahun 1950an dan paruh pertama tahun 1960an, mengkhawatirkan kekuatan Barat (Amerika Serikat dan Inggris serta sekutunya, Australia) yang anti komunis. Dari sudut pandang Australia, Pulau Irian (New Guinea) diproyeksikan untuk menjadi kawasan penyanggah (*buffer state*) yang dapat melindungi Australia dari kemungkinan ancaman kekuatan asing yang datang dari utara. Australia dibawah Perdana Menteri R.G. Menzies dari Partai Liberal berpendapat bahwa kondisi ekonomi Indonesia memberikan kemudahan bagi tumbuh dan berkembangnya paham komunisme di Indonesia. Dalam sengketa Irian Barat, pemerintah Australia pada waktu itu lebih menyukai diteruskannya administrasi Belanda di Irian Barat. Di mata Australia, Belanda, yang merupakan sekutu lama Australia sebelum Perang Dunia Kedua dan juga sekutu dalam Blok Barat (anggota NATO), jauh lebih dipercaya daripada Indonesia sebagai negara baru yang belum stabil.<sup>12</sup> Akibatnya, klaim Indonesia atas Irian Barat ditentang oleh pihak Australia melalui pidato P.C. Spender, Menteri Luar Negeri Australia di Amerika Serikat pada bulan Agustus

1950 sebagai berikut:

*West New Guinea was so vital in fact (to Australia's) that Australia would use all means (to) prevent it falling into Asian (Indonesia) hands... I can state categorically that Australia public opinion will never permit Indonesia control over Netherlands New Guinea also with the form of transfer sovereignty, joint trusteeship or condominium.*<sup>13</sup>

Sikap Australia tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi langsung dari situasi Perang Dingin, yang kemudian memicu Blok Barat melakukan berbagai upaya untuk menghambat penyebaran komunisme.

Tradisi liberal pers Australia juga memicu surutnya hubungan kedua negara. Maka ketika muncul tulisan David Jenkins dalam harian *The Sydney Morning Herald*. 10 April 1986, yang menyoroiti bisnis keluarga Cendana, hubungan kedua pemerintahan menjadi surut. Demikian pula, ketika terjadi penolakan Australia atas penempatan Duta Besar Indonesia untuk Australia Letjen TNI-AD Herman Bernhard Leopold Mantiri tahun 1995, peristiwa

<sup>12</sup> Estherlita Amelia Situmorang, 'Membendung Bahaya "Merah" di Perbatasan Utara: Orientasi Kebijakan Pemerintah Australia Terhadap Indonesia (1959-1968)', Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra UI, 1993, hal. 49 & 52.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 50.

Dili, 12 November 1991, proses dan pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, penerimaan Australia terhadap pengungsi dari Timor Timur, dan pembakaran bendera Indonesia di Australia, mengakibatkan rangkaian ketegangan dalam hubungan kedua pemerintahan. Dengan demikian sangatlah jelas apabila dua kebudayaan yang berbeda secara radikal bertemu dan berinteraksi, maka situasi tertentu akan mampu mengalihkan perbedaan yang ada menjadi sumber konflik.

Dalam kebijakan pertahanan keamanannya, Australia terikat dalam beberapa pakta militer SEATO (*South East Asia Treaty Organization*), ANZUS (Australia, New Zealand, dan United States), dan FPDA (*Five Powers Defense Arrangement*), yang terdiri dari Inggris, Australia, New Zealand, Malaysia, dan Singapura). Sebelum 1970an, doktrin strategis pertahanan Australia dikenal dengan *Forward Defence Strategy* (Strategi Pertahanan Jauh Ke Depan), di mana Australia menyumbangkan kekuatan pertahanannya membantu Amerika Serikat dan Inggris dalam membandung komunisme yang datang dari utara.<sup>14</sup> Karenanya tidaklah menghe-

rankan apabila Australia terlibat dalam perang Korea, konflik Indonesia-Malaya, dan perang Vietnam. Sejak pertengahan 1970an, Australia mengembangkan strategi *Continental Defence* (Pertahanan Benua) yang lebih memusatkan pada pertahanan diri wilayah Australia. Namun sesuai dengan *Defence White Paper 1987* (Buku Putih Pertahanan 1987) konsep *Direct Military Interest* diterapkan. Konsep tersebut mencakup wilayah Australia, lautan terdekat termasuk Indonesia Papua Niugini, Selandia Baru, negara-negara Pasifik Barat daya yang terdekat, ditambah lagi dengan konsep *Strategic Interest*. Dengan demikian, Australia bukan saja mendasari pertahanannya pada *Defence in Dept*, tetapi masih mengutamakan *Forward Defence Strategy* daripada *Continental Defence*.<sup>15</sup> Jika dalam Buku Putih Pertahanan 1987 yang berjudul *The Defence of Australia*, Australia masih memandang bahwa Indonesia adalah "Negara dari dan melalui mana ancaman terhadap Australia dapat dilakukan", maka dalam Buku Putih Pertahanan 1994 yang berjudul *Defending Australia*, Australia memandang kerjasama keamanan antara Australia dan Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dari bangunan jarring

<sup>14</sup> Ikrar Nusa Bhakti, "Faktor-faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia", Manuskrip.

<sup>15</sup> Ibid.

laba-laba pertahanan Australia dengan negara-negara Asia Tenggara.<sup>16</sup> Maka pada tanggal 18 Desember 1995, *Agreement on Maintaining Security* (Persetujuan Pemeliharaan Keamanan) antara Australia dan Indonesia ditandatangani.

Sementara itu kerjasama Indonesia dan Australia dalam berbagai bidang lainnya tampak sangat erat. Hal ini terbukti dalam Laporan Ausaid tertanggal 18 Juli 2005 tentang berbagai proyek bantuan Australia kepada Indonesia, yang meliputi bidang Pendidikan (Pendidikan dan Pelatihan); *Governance* (*Economic dan Civil Governance*); Keamanan (Keamanan dan Stabilitas; Bantuan Darurat dan Kemanusiaan); *Indonesia Bagian Timur* (Kesehatan; Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi; Pengentasan Kemiskinan; Manajemen Sumber Daya Alam); *Asia Regional dan Program-program lain*, ditambah *Proyek per Propinsi* (Bantuan pembangunan di 20 propinsi di Indonesia).<sup>17</sup>

Kerjasama dalam bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa Australia (untuk *Postgraduate Programmes* dan berbagai pelatihan) telah dimulai sejak

tahun 1950an secara reguler, yaitu Beasiswa *Colombo Plan*, AIDAB, dan sekarang disebut *ADS: Australia Development Scholarship*. Jumlah penerima beasiswa semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2005, ADS diberikan kepada 600 orang Indonesia untuk menempuh pendidikan dan pelatihan di Australia. Kerjasama dalam bidang pendidikan antara Indonesia dan Australia tidaklah pernah tergoyahkan oleh hubungan kedua negara yang kadangkala mengalami ketegangan. Selanjutnya, pada tahun 2004 Australia menyumbang sekitar A\$14 million (14 Juta Dollar Australia) untuk membantu DPR dan Pemilihan Presiden, dan sebelumnya Australia memberikan bantuan sekitar \$A6,5 million (6,5 Juta Dollar Australia) untuk pemilihan tingkat lokal yang berlangsung selama beberapa tahun.<sup>18</sup> Demikian pula ketika terjadi tragedi nasional gempa bumi dan Tsunami di Aceh, disusul dengan gempa bumi di Pulau Nias, bantuan darurat dan kemanusiaan secara serentak dan sangat signifikan segera diberikan Australia kepada pihak Indonesia. Tercatat 9 personel Australian Defence Force (Angkatan Perang Australia) meninggal akibat kecelakaan helikopter dalam rangka

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> <http://www.ausaid.gov.au>

<sup>18</sup> Australian Ambassador's address to the IABC (Indonesia - Australia Business Council), International MidPlaza Hotel, Jakarta, Tuesday, 25 October 2005.

melaksanakan misi kemanusiaan di Pulau Nias — suatu kejadian yang sangat menyedihkan dan mengharukan bagi kedua bangsa dan patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya atas kepahlawanan mereka.

Pada awal Januari 2005 Perdana Menteri Australia, John Howard, mengumumkan akan memberikan bantuannya senilai A\$ 1 billion (1 Milyar Dollar Australia) selama kurun waktu lima tahun, khusus untuk Aceh yang terkena gempa bumi dan tsunami.<sup>19</sup> Sementara itu sumbangan sukarela secara spontan dari masyarakat Australia berhasil dikumpulkan dan mencapai jumlah A\$ 300 million (Tiga Ratus Juta Dollar Australia), khusus untuk bantuan kemanusiaan di Aceh, sumbangan terbesar untuk kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah Australia. Kemudian, ketika Indonesia menghadapi masalah merebaknya penyakit SARS, HIV/AIDS, dan baru-baru ini penyakit polio, disusul dengan flu burung atau Avian Influenza (AI), Australia segera mengulurkan bantuannya.

Sementara itu kerjasama dalam bidang keamanan tetap berjalan dan cenderung menguat sejak penandatanganan Per-

setujuan Pemeliharaan Keamanan antara Indonesia Australia tahun 1995. Sejak kegiatan terorisme merebak di Indonesia, diantaranya tragedi Bom Bali Pertama (2002) terjadi, dengan korban tewas tercatat 202 orang, 88 diantaranya orang Australia, disusul dengan peledakan bom di Hotel Marriot, Jakarta (2003), peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta (2004), dan tragedi Bom Bali Kedua baru-baru ini (1 Oktober 2005), kerjasama dalam bidang pemeliharaan keamanan menjadi semakin mendalam, erat dan intensif, suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah kerjasama Indonesia-Australia di bidang keamanan. Australia telah mendukung pendirian JCLEC (*Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation*) atau Pusat Kerjasama Penegakan Hukum pada tahun lalu, dengan menyumbang senilai A\$36,8 million (36,8 Juta Dollar Australia).<sup>20</sup> *Centre* tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan regional dalam bidang anti-terorisme. Bantuan ini kemudian dimanfaatkan untuk sejumlah program anti-terorisme, terutama dalam 3 sektor, yaitu meningkatkan kemampuan keamanan perjalanan POLRI, memerangi keuangan teroris,

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Siaran Pers Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, 7 Desember 2004.

dan menangani prioritas baru yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, *Transnational Crime Centre* (TNCC) atau Pusat Kejahatan Lintas Batas baru-baru ini didirikan di Jakarta, di mana Australia memberikan bantuan senilai A\$4,7 million (\$,7 Juta Dollar Australia).<sup>21</sup> TNCC akan terus menjadi titik pusat POLRI dalam pencegahan, identifikasi dan penghancuran semua bentuk kejahatan, termasuk terorisme. Bantuan Australia kepada Indonesia

juga untuk memperkuat pelabuhan udara, kemampuan imigrasi serta kontrol bea cukai. Maka Departemen terkait di Australia mulai bekerjasama dengan mitranya di Indonesia untuk meningkatkan keamanan, pengintaian dan analisa.

Uraian tersebut di atas jelas mencerminkan betapa meluas, beragam, mendalam, dan intensifnya hubungan kerjasama RI-Australia dalam berbagai bidang.

### III

## PROSPEK HUBUNGAN RI – AUSTRALIA TAHUN 2006

### (PENUTUP)

Kebijakan keamanan Australia terhadap Indonesia dapat ditinjau dari beberapa segi, secara geopolitik, geoekonomi, dan geografi.<sup>22</sup> Secara geopolitik, negara-negara yang mengelilingi Australia (Papua Niugini dan Indonesia) pada dasarnya mempunyai nilai strategis bagi Australia, yang berfungsi sebagai benteng pertahanannya dari invasi musuh, namun sekaligus merupakan titik kele-

mahannya yang utama. Menurut pandangan Australia, penguasaan pulau-pulau di utara oleh kekuatan yang tidak bersahabat, secara langsung akan mengganggu kepentingan nasional Australia. Secara geoekonomi, penguasaan pulau-pulau di utara benua Australia oleh kekuatan yang tidak bersahabat, akan mengganggu jalur-jalur transportasi antar kedua samudera – India dan Pasifik, dan pada gilirannya, terganggunya hubungan perdagangan luar negeri dengan pasar-pasar internasional. Secara geografi, Indonesia merupakan negara tetangga terdekat yang sangat

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Mayjen TNI Sudrajat, MPA, "Kebijakan Keamanan Australia Terhadap Integritas Teritorial Indonesia", Workshop bertema *Kebijakan Australia Terhadap Integritas Teritorial Indonesia*, Pusat Penelitian Politik, LIPI, Jakarta, 22 Mei 2003.

potensi sebagai *land base* dan tumbuh-kembangnya kegiatan-kegiatan *transnational crime* dan terorisme.<sup>23</sup> Dengan demikian serangan terhadap berbagai kepentingan Australia dapat datang dari segala arah. Selain itu, Indonesia menjadi wilayah *transit passage* bagi imigran gelap yang datang dari Afganistan, Irak, Iran, termasuk Indonesia, yang mencuat dalam kasus kapal MV Tampa beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Australia menempatkan kebijakan keamanannya terhadap Indonesia sebagai agenda prioritas dalam membangun stabilitas keamanan dan ekonomi mengingat Indonesia juga menjadi salah satu potensi pasar bagi Australia, di samping sebagai mitra strategis dalam menata sistem keamanan di Asia Pasifik, khususnya di Asia Tenggara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya apabila terdapat kepentingan yang sama diantara dua negara dan masyarakat yang saling bertemu dan berinteraksi, maka kepentingan yang sama tersebut akan mendorong kedua negara dan masyarakat terkait kearah hubungan kerjasama yang erat dan kokoh. Kebijakan anti terorisme yang merupakan kepentingan nasional bersama baik bagi Indonesia maupun bagi Australia, mampu

membentuk landasan kerjasama yang kokoh, erat dan harmonis antara kedua negara.

Sementara kerjasama RI dan Australia dalam berbagai bidang telah berjalan dengan lancar, tidaklah dapat disangkal masih terdapatnya beberapa ganjalan dalam hubungan RI dan Australia, diantaranya masalah HAM di Indonesia dan *illegal fishing* oleh nelayan Indonesia yang menyentuh perairan Australia, mulai membuat Australia terganggu. Sementara itu, pada tingkatan dan kalangan tertentu di Indonesia, terdapat keraguan tentang sikap Australia terhadap integritas wilayah RI di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan membuka berbagai saluran dialog secara lebih dewasa dan transparan antar berbagai kalangan baik dari pihak Indonesia maupun pihak Australia, serta dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum terkait dan pertimbangan atas kepentingan nasional dan kedaulatan negara masing-masing, maka berbagai masalah tersebut di atas akan dapat diselesaikan secara damai, tanpa menggoyahkan kerjasama kedua negara yang telah mempunyai fondasi kuat berdasarkan Perjanjian Pemeliharaan Keamanan antara RI dan Australia yang ditandatangani tahun 1995.

---

<sup>23</sup> Ibid.

Perjanjian Pemeliharaan Keamanan tersebut lebih merupakan strategi membangun keamanan dan kepercayaan di antara negara-negara di Asia Pasifik (*Asia Pacific Confidence and Security Building Measures-CSBM*), daripada merupakan "Pakta Militer/Pertahanan".<sup>24</sup> Adapun isinya mengandung unsur konsultasi untuk membentuk pertahanan bersama antara kedua negara apabila salah satu pihak menghadapi kesulitan keamanan.<sup>25</sup> Perjanjian tersebut ditandatangani pada era pasca Perang Dingin, yang mengarah pada ketidakmenentuan perkembangan politik dan keamanan di Asia Pasifik. Ikrar Nusa Bhakti mencatat adanya keinginan Amerika Serikat untuk menarik diri dari kawasan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara, yang apabila terjadi, maka dikhawatirkan akan muncul sebuah negara atau lebih yang mendominasi kawasan, khususnya Jepang, RRC dan India.<sup>26</sup> Amerika Serikat dianggap lebih "ramah" dalam hal menjaga stabilitas keamanan di Asia Timur, maka atas dasar pertimbangan tersebut, Indonesia dan Australia sebagai negara kekuatan menengah di Asia Tenggara,

perlu mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah bersama, khususnya dalam mempertahankan keamanan negara masing-masing, dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya.<sup>27</sup>

Merujuk ungkapan PM Paul Keating, "*no more important for Australia rather than Indonesia*", yang disusul dengan Penandatanganan Perjanjian Pemeliharaan Keamanan pada tahun 1995, maka hal ini sekaligus memberi makna bahwa Australia mempunyai sikap dalam mendukung integritas teritorial Indonesia<sup>28</sup>. Adapun berbagai mispersepsi yang kadangkala muncul dikarenakan kurang intensifnya kiat-kiat forum dialogis, transparansi dan akuntabilitas kedua belah pihak.<sup>29</sup> Merembaknya berbagai teror bom di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini memberi arti pentingnya Indonesia bagi Australia dalam memberikan jaminan keamanan di kawasan. Fondasi kerjasama RI dan Australia semakin kokoh dengan pembentukan *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (ICLEC)* dan *Trans National Crime Centre (TNCC)* di Jakarta, serta bantuan dana yang signi-

<sup>24</sup> Ikrar Nusa Bhakti, "Kilas Balik Hubungan Australia-Indonesia 1995 dan Prospeknya di Masa Depan", Manuskrip.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Mayjen TNI Sudrajat, MPA, Op.Cit.

<sup>29</sup> Ibid.

fikan dan sukarelawan untuk Aceh akibat gempa bumi dan Tsunami.

Berdasarkan pengamatan hubungan RI-Australia sejak beberapa tahun yang lalu, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2006 yang akan datang, prospek hubungan RI-Australia akan lebih mendalam, meluas, erat, dan intensif, yang meliputi bidang keamanan (program-program kegiatan anti terorisme dan anti kejahatan lintas batas), bidang pendidikan, *Governance*, berbagai proyek di Indonesia Bagian Timur seperti telah disebutkan di atas, serta berbagai program kerjasama di berbagai propinsi. □

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku, Proceeding Convention, Theses (Skripsi S1, S2, S3), Manuskrip, Pidato (Address), Siaran Press :

1. Australian Ambassador's address to the IABC (Indonesia-Australia Business Council), International MidPlaza Hotel, Jakarta, Tuesday, 25 October 2005.
2. Clark, Manning, *A Short History of Australia* (Hard Copy and Illustration Edition), The Macmillan Company of Australia Pty, 1981.
3. Hirst, J.B., *Convict Society and its enemies*, Sydney, George & Allen & Unwin, 1987 (Cetakan Keempat)
4. Ditto, "Egalitarianism" dalam *Australian Cultural History*, No. 5, 1986.
5. Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro (Editor), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V dan VI, Depdikbud, 1976.
6. Lockwood, Rupert, *Black armada*, Sydney, Australia Book Society, 1975.
7. Macknight, C.C., *The Voyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia*, Melbourne University Press, 1976.
8. McGregor, Craig, *Profile of Australia*, Penguin Books, 1968. Cetakan Pertama (1966).
9. Nusa Bhakti, Ikrar, "Faktor-faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia", Manuskrip.
10. Ditto, "Kilas Balik Hubungan Australia-Indonesia 1995 dan Prospeknya di Masa Datang", Manuskrip.
11. Siaran Pers Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, 7 Desember 2004.
12. Situmorang, Estherlita Amelia, 'Membendung Bahaya "Merah" di Perbatasan Utara: Orientasi Kebija-

- kan Pemerintah Australia Terhadap Indonesia (1959-1968)", Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra UI, 1993.
13. Soerjohardjo, Wardiningsih, "Aspect of Life in Gundagai 1840-1860", MA Thesis, Australian National University, 1987.
14. Ditto, "Australian and Indonesian Cultural Differences: Constraint or Attraction?", dalam *Australia and Indonesia: Common Challenges Reflecting Cultural Diversity*, Proceeding of the Third International Convention of the Indonesian Cultural and Educational Institute, Northern Territory University, Darwin, 1989, hal. 42-51.
15. Ditto, "Language Control in New South Wales 1788-1950", Ph.D Thesis, University of New South Wales, Sydney, Australia, 1994.
16. Sudradjat, MPA, Mayjen TNI, "Kebijakan Keamanan Australia Terhadap Integritas Teritorial Indonesia", Workshop bertema *Kebijakan Australia Terhadap Integritas Teritorial Indonesia*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, 22 Mei 2003.
17. Undang - Undang Dasar 1945 dan Amandemen Lengkap, Jakarta, Penerbit Poliyama Widyapustaka (tanpa tahun terbit).
18. Ward, Russel, *The Australian Legend*, London, Oxford University Press, 1958, hal. 83-84.

## II. Website Ausaid:

<http://www.indo.usaid.gov.au> (Tentang Laporan Ausaid di Indonesia Tertanggal 8 Juli 2005)